

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris diberikan perlindungan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris akan tetapi pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020 hakim menolak gugatan penggugat yaitu PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) dengan dasar pertimbangan bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak dari pertimbangan hukum hakim terhadap ditolaknya gugatan penggugat pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020. Untuk mengetahui peranan dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil oleh penyidik polri berkaitan dengan akta yang dibuatnya khususnya berkenaan dengan asas *Equality Before The Law*, Untuk mengetahui analisis hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini, bersifat yuridis normatif (*normative legal research*) dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Disamping itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conseptualical approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dengan mempelajari ilmu hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi pada penelitian. Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik yang ditunjuk oleh Negara haruslah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 66 No. 2 Tahun 2014 dimana MKN sebagai lembaga yang memberikan penolakan atau persetujuan kepada penyidik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari wajib memberikan persetujuan dan penolakan sesuai dengan kriteria sesuai dengan Pasal 33 Permenkumham No. 17 Tahun 2021, sedangkan Notaris sendiri memiliki kewajiban sesuai dengan sumpah jabatannya dan juga yang tertera dalam Pasal 4 dan Pasal 16 UUDN bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, Hendak nya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan dan hakim (pengadilan) tidak memandang ketentuan Pasal 66 UUDN sebagai aturan yang mempersulit proses hukum acara pidana terhadap notaris. Namun pada dasarnya ketentuan Pasal 66 UUDN tersebut merupakan suatu aturan yang melindungi dokumen. Kejaksaan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, terdakwa atau mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan dalam berbagai perkara pidana maupun keperdataan, dengan meminta persetujuan MKN terlebih dahulu sebagai payung perlindungan bagi Notaris.

Kata kunci : Kejaksaan, Notaris, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

In carrying out their duties and authorities, the Notary is given legal protection as contained in Article 66 paragraph 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, but in the decision of the Constitutional Court No.16/PUU-XVIII /2020 the judge rejected the plaintiff's lawsuit, namely PJI on the basis of the consideration that the plaintiff has no legal standing. The purpose of this research is to find out the impact of the judge's legal considerations on the rejection of the plaintiff's claim in the Constitutional Court decision No.16/PUU-XVIII/2020, To find out the role and function of the Notary Honorary Council (MKN) in legal protection of Notaries summoned by police investigators in relation to the deed he made, especially with regard to the principle of Equality Before The Law, To find out legal analysis of considerations judge in the decision of the Constitutional Court Number: 16/PUU-XVIII/2020. This research is normative juridical (normative legal research) carried out with a statutory approach (statute approach) that is by studying and analyzing regulations that are related to the legal issues being dealt with. In addition to that, a conceptual approach is also used (conceptual approach), namely moving from the views and doctrines that have developed by studying the views of the doctrines in the science of law that are relevant to the issues encountered in research regarding legal protection for notaries in carrying out their duties and obligations as public officials. Notaries as officials who make authentic deeds appointed by the State must receive legal protection, as contained in Article 66 No. 2 of 2014 concerning changes to No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary where the MKN as an institution that gives rejection or approval to investigators for alleged violations committed by a Notary, within 30 (thirty) days must give approval and rejection according to the criteria according to Article 33 Permenkumham No. 17 of 2021, while the Notary himself has an obligation in accordance with his oath of office and also stated in Article 4 and Article 16 of the Notary Office Law that the notary is obliged to keep everything about the deed he made confidential. court) does not view the provisions of Article 66 UUJN as a rule that complicates the criminal procedure law process against a notary. But basically the provisions of Article 66 UUJN is a rule that protects documents. the prosecutor's office may summon a notary as a witness, defendant or take a photocopy of the minutes of the deed and/or the letters attached to the minutes of the deed or the notary's protocol in the notary's safekeeping in the interests of the judicial process in various cases both civil, criminal or state administration by seeking the approval of the MKN first as an umbrella of protection for the Notary.

Keywords: Attorney; Notary; Constitutional Court